

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Kegiatan PKPA di BBPOM Surabaya dapat memberikan gambaran kepada calon apoteker tentang bagaimana peran, tugas dan fungsi apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
2. Kegiatan PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dapat memberikan pembekalan kepada calon apoteker agar memiliki keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sehingga siap menjadi tenaga farmasi yang profesional terutama terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Kegiatan PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dapat mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja dan menjadi calon apoteker yang profesional terutama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Berdasarkan kasus yang didapat maka, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), pelaku usaha serta masyarakat harus teliti memperhatikan batasan maksimal jumlah bahan yang terkandung serta cemaran mikroba dalam sediaan farmasi seperti produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan juga sediaan pangan.

## 4.2 **Saran**

1. Kegiatan PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dapat dilakukan secara luring, sehingga mahasiswa calon Apoteker dapat berpartisipasi dan melihat secara langsung peran Apoteker dalam mengontrol kualitas, mutu, keamanan sediaan farmasi dan pangan.
2. Perlu dilakukan peningkatan perihal pemberian informasi kepada masyarakat terkait problematika yang sedang terjadi saat ini, dengan melakukan iklan dalam bentuk animasi yang dapat ditayangkan di televisi maupun media sosial BPOM. Pada anggota masyarakat yang berdomisili jauh dari perkotaan, informasi dapat disajikan melalui pemajangan spanduk atau poster serta dapat dilakukan melalui metode penyuluhan atau sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden. 2017, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2023, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2024, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2023* diakses pada 8 Maret 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table>.
- BPOM, 2020, Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.
- BPOM, 2020, Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Nomor OT.01.03.33.331.08.20.43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Publik di Badan Pengawas obat dan Makanan untuk Jenis Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.
- BPOM. 2020, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi Komunikasi , Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan.
- BPOM. 2022, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BPOM, 2018, Penjelasan Fungsi UPT BPOM Fungsi Pengawasan/Pemeriksaan.

- BPOM, 2018, Peraturan BPOM 12/2018 tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM.
- BPOM, 2018, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan badan pengawas obat dan makanan.
- Faridah, D. N., Erawan, D., Sutriah, K., Hadi, A., dan Budiantari, F, 2018, Implementasi SNI
- ISO/IEC 17025: 2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Badan Standarisasi Nasional.
- Kepala BPOM, 2009. Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No HK.00.06.1.54.2797 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Makanan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan, Jakarta; Indonesia.
- Menteri Kesehatan RI, 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan No 2 Tahun 2013, Jakarta: Indonesia.
- Peraturan BPOM Nomor 21, 2020, tentang Organisasi dan tata kerja badan pengawasan obat dan makanan, Jakarta: Indonesia.
- Pemerintahan Republik Indonesia, 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Jakarta: Indonesia.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2023, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Makanan, BPOM RI

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan, BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2023, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam, BPOM RI.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Unit di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2018. Jakarta Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 2014. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jakarta, Indonesia.